BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan internasional

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan, yang dapat berupa kerjasama, konflik, ataupun perang. Hubungan Internasional merupakan displin ilmu yang sedang tumbuh berkembang. Dahulu dalam interaksinya hanya melibatkan aktor negara, namun sekarang aktor bukan negara dapat terlibat dalam berinteraksi antar negara.

Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abab ke-19 disiplin HI lebih memfokuskan pada isu diseputar masalah peperangan dan perdamaian (*war and peace),* maka pada perkembangan selanjutnya HI mulai merambah kepersoalan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, memahami ketimpangan hubungan antara kelompok negara kaya dengan negara miskin, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime),* upaya untuk mengatasi konflik dan separatisme, dan sebagainya (Hermawan, 2007: 1-2).

Dari sisi aktor, karena membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, maka pada awalnya (dan bahkan hingga saat ini) disiplin HI sesungguhnya menitikberatkan pada "negara" (*state)* sebagai subjek rujukannya. Jika seorang pakar HI berbicara mengenai perilaku, kepentingan, pembuatan keputusan dan sebagainya, maka semua itu mengarah pada negara. Bagi para pakar HI - setidaknya sebagian besar dari mereka – negara adalah "pemegang

kekerasan yang dominan" (*legitimate violence dominator)* yang dapat menggunakan kekerasan secara abash (*legitimate)* karena berhak menggunakan kekuatan militer, kepolisian dan kehakiman untuk menegakkan keamanan, ketertiban dan hukum (Hermawan, 2007: 2).

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi hubungan internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara berdaulat di dunia atau merupakan studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Hubungan antara Indonesia dan Rusia merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional, aktor hubungan internasional bisa saja merupakan merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara seperti yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap negara akan melakukan

interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Tujuan studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan, baik dari aktor pemerintah maupun bukan pemerintah.

2.2 Kepentingan Nasional

Interaksi yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam buku *Pengantar hubungan Internasional*, sebagai:

> "Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapa dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara" (Perwita dan Yani, 2005:35).

Masing-masing negara dalam sistem internasional saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subjektif. Meski para pembuat keputusan harus berhubungan dengan berbagai variable didalam lingkungan internasional, tetapi konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling penting serta berfungsi sebagai tonggak petunjuk arah bagi para pembuat keputusan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Sementara menurut T. May Rudi dalam bukunya *Studi Strategis: Dalam transformasi Sistem Internasional pasca perang Dingin* disebutkan kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security),* pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap bangsa (Rudi. 2002: 116).

2.3 Politik Luar Negeri

Pada dasarnya tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional. Maka, dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. (Perwita dan Yani, 2005:50)

Politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*: sebagai berikut:

> "politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional" (Perwita dan yani, 2005: 47).

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek interenal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap mejadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perannya dalam hubungan internasional (Perwita dan yani, 2005: 48)

2.4 Kerjasama

Dalam hubungan internasional, interaksi antar negara dapat terjadi melalui bentuk-bentuk seperti kerjasama, konflik, atau yang lebih parah lagi adalah perang. Untuk mencegah hal yang lebih parah itu, maka setiap negara akan memaksimalkan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan karena tidak ada negara didunia ini yang dapat hidup tanpa negara lain. Melalui kerjasama juga dapat mencegah dari perang, negara akan memilih bekerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan yang sama atau hampir sama ketimbang memilih jalan perang. Kerjasama merupakan hasil interaksi antar negara untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu, jadi kerjasama menurut peneliti merupakan salah satu hasil dari politik luar negeri. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Rusia, Indonesia melalui politik luar negerinya berusaha memenuhi kebutuhannya dalam kepentingan nasional untuk melengkapi *alutsista*nya yang memang dirasa masih kurang.

> "Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34)".

Dengan kata lain, Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu Kerjasama Internasional.

> "Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33)".

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi

di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Dalam kerjasama militer yang melibatkan Indonesia dan Rusia diharapkan membawa pengaruh bagi kekuatan TNI Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan alat pertahanan yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 Pengaruh

Kerjasama militer Indonesia dengan Rusia merupakan hasil yang timbul dari situasi kurangnya anggaran dan kemampuan TNI Angkatan Udara Indonesia dalam menyiapkan pertahanan udaranya untuk itu diperlukan kerjasama dengan Rusia untuk melengkapinya kebutuhan TNI Angkatan Udara.

Konsep pengaruh menurut Alvin Z Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influence in the Third World*:

> "Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai "hasil yang timbul dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumber" dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil" (Rubinstein, 1976 : 3-6).

Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes* (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Lingkungan eksternal dan internal memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan salah satu pakar hubungan internasional K.J Holsti memberikan definisinya mengenai konsep pengaruh beserta variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh,

> "Pengaruh adalah perangkat untuk mencapai tujuan digunakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, termasuk didalam tujuan adalah prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan" (Holsti, 1988: 201-203).

Dari sisi sudut pandang negara, variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan pengaruh ialah:

1. Kapabilitas negara.
2. Persepsi terhadap pemakaian kapabilitas tersebut.
3. Kebutuhan antara dua negara dalam hubungan yang saling mempengaruhi.
4. Kualitas ketanggapan.

Pengorbanan dan komitmen (Holsti, 1988:209).

Sedangkan menurut T. May Rudy, "Pengaruh" sendiri dapat dianalisis dalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah saran untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain, melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.
3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lain (individu, kelompok, organisasi, dan negara).

4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar-kecilnya keuntungan atau kerugian) (Rudy, 1993:24-25).

2.6 Politik Internasional

Dalam setiap interaksi yang terjadi dalam lingkungan internasional pasti akan melibatkan negara lain. Setiap negara akan memperjuangkan politik luar negerinya tersebut dalam interaksinya dengan negara lain yang terlibat didalamnya. Pertemuan politik luar negeri masing-masing negara tersebut disebut dengan politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam Hubungan Internasional. Interaksi yang tejadi dalam hubungan internasional antar negara merupakan salah satu wujud politik internasional.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik“ (Perwita dan Yani, 2005: 40).

Politik internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *power*, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat

keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi (Perwita dan Yani, 2005: 40)

Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Formulasi dari pola aksi-reaksi ini member kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris (Perwita dan Yani, 2005: 42).

2.7 Konsep Keamanan Dan Ancaman

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi juga soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya.

Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga

berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup, semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya (Perwita & Yani, 2005: 119).

Dalam buku *Transformasi Dalam Studi Hubungan internasional*, pengertian keamanan yang dikemukakan oleh Walter Lippmann yaitu:

> " Bangsa akan aman sejauh mana tidak membahayakan nilai-nilai inti jika ingin menghindari perang, dan mampu bila ditantang, untuk mempertahankan kemenangan mereka seperti dengan perang." (Hermawan, 2007: 28).

Keamanan nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional. Makna keamanan (*security)* bukan sekedar kondisi „aman tentram" tetapi keselamatannya atau kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Didalam konsep ini, terdapat tiga kepentingan inti yang secara mendasar dapat mendapat ancaman dari luar, yaitu:

1. Pertama, adalah *Physical Secutiry* atau keamanan fisik dari masyarakat suatu negara dan hak milik pribadi mereka.
2. Kedua adalah *Rules and institution* yang dilaksanakan suatu masyarakat negara, khususnya konstitusi dan aturan formal lainnya.
3. Ketiga adalah *prosperity* yaitu sumber modal, barang mentah, sistem keuangan dan lain lain (Rudi, 2002: 64-65)

Dari teori yang telah dijelaskan diatas dipahami bahwa setiap negara pasti akan menghindari perang, namun bilamana tidak dapat dihindari maka setiap

negara harus bersiap untuk perang untuk menjamin keamanan negaranya. Fokus keamanan dengan demikian terletak pada kapabilitas persenjataan (militer) suatu negara, tidak heran bila kemudian setiap negara-negara akan memperkuat kemampuan militernya untuk menjamin keamanan negaranya masing-masing. Itulah pentingnya kekuatan militer suatu negara, bilamana ada hal yang mengancam eksistensi suatu negara maka negara tersebut dapat menangkalnya dengan kekuatan militer yang dia punya.

Sebuah keadaan yang dapat membahayakan keamanan nasional merupakan perpaduan dari ancaman dan kerawanan. Keduanya berhubungan erat serta berhubungan dengan keamanan baik nasional maupun internasional. Yang dapat dilakukan sebuah negara untuk menangkal hal ini adalah dengan membuat kebijakan keamanan nasional yang difokuskan pada negara itu sendiri, sebagai upaua untuk meredam keamanan dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar (Rudi, 2002: 31).

Macam ancaman dari berbagai sektor menurut T. May Rudi dalam bukunya *Studi Strategis: Dalam transformasi Sistem Internasional pasca perang Dingin:*

1. Militer

   Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur-unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan

prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah diraih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktifitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan.

2. Politik

   Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan intrik politik yang mampu mengganggu jalannya pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang terdapat di semua bangsa-bangsa didunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik negara maupun kekuatan yang dimilikinya.

3. Sosial

   Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi disebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik , atau dapat pula dari perbedaan kultur. Kendala utama yang dihadapi dalam menghadapi ancaman sosial adalah, bahwasannya ancaman tersebut biasanya datang dari dalam negeri sendiri.

4. Ekonomi

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut tidak mampu segera bangkit dari aspek struktural tersebut, maka keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu.

5. Ekologi

   Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisonal, ancaman ekologi dapat dilihat sebagai ketidaksengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional (Rudi, 2002: 33-35).

Sedangkan konteks ancaman dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 24 adalah:

> "Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Ancaman terhadap suatu bangsa atau negara bisa datang dari dalam maupun luar, namun biasanya lebih banyak datang dari lingkungan luar. Ancaman-ancaman ini biasanya bersifat militer atau ancaman bersenjata dan membutuhkan respon militer dalam menghadapinya.

2.8 Konsep Militer dan Unsur Militer

Setiap negara pasti ingin menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Demi menjamin keamanan nasional, setiap negara memiliki kekuatan nasional yang didalamnya terdapat kekuatan militer.

Militer dalam UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 20 adalah:

"Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Dalam buku *Pertahanan Negara dan postur TNI Ideal* karangan Connie Rahakundini Bakrie, Elliot A. Cohen mendefinisikan militer sebagai personel militer, lembaga militer, atau hanya para perwira senior. Lebih lanjut lagi, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo mendefinisikan militer sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan bangsa (Bakrie, 2007: 41).

Sedangkan unsur militer yang dijelaskan oleh Vandana dalam bukunya *Theory Of International Politics,* yaitu:

> "Unsur militer merupakan faktor penting dalam kekuatan nasional. Kesiapan militer berarti, organisasi militer dan struktur yang membantu untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan sebuah negara dalam konteks militer didasarkan pada kualitas dan kuantitas angkatan bersenjata, dan jenis persenjataan-konvensional, *unconventional* atau nuklir. Kualitas kepimpinan militer dan perencanaan juga menambahkan sebagai unsur-unsur militer dari kekuatan nasional. Sementara semua bangsa mungkin mememiliki perbedaan persenjataan dalam teknologi peperangan yang menentukan nasib bangsa dan peradaban. Amerika Serikat adalah kekuatan utama karena kesiapan militer, teknologi, dan kualitas dan kuantitas manusia dan senjata" (Vandana, 1996: 126).

Organisasi militer menurut Beishline dalam buku *Pertahanan Negara dan postur TNI Ideal* karangan Connie Rahakundini Bakrie, sebagai:

> "proses membuat prosedur-prosedur, faktor-faktor, dan struktur organisasi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan" (Bakrie, 2007: 22).

Dalam pengorganisasian pada dasarnya kita berusaha untuk mendefinisikan perencanaan ke dalam bagan organisasi sebagai bentuk mekanisme manajemen untuk menjalankan tugas dan melakukan pengontrolan guna meraih tujuan organisasi (Bakrie, 2007: 22-23).

Tujuan organisasi militer, kebijakan, otoritas, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban memepengaruhi bangunan struktur organisasi. Struktur organisasi militer umumnya dikeluarkan oleh otoritas paling tinggi. Menurut Beishline, struktur organisasi adalah:

> "Kerangka mekanisme yang saling memperkaitkan antara fungsi, faktor fisik, dan manusia di mana melalui unit militer digunakan untuk mencapai tujuan organisasi" (Bakrie, 2007: 26-27).

Pemimpin harus senantiasa memperhatikan bawahannya guna mempermudah kerjasama dan koordinasi dalam mencapai tujuan tugasnya. Konsep ini dikenal dengan kepemimpinan. Tentara yang memiliki keahlian perang tinggi dan terlatih dengan baik yang didukung dengan keahlian khusus, tidak akan berhasil memenangkan peperangan jika komandannya tidak memiliki jiwa kepemimpinan.

Dalam soal kepemimpinan sedikitnya kita mengenal dua tipe yakni, kepemimpinan eksekutif (*executive leadership)* yang terkait dengan persoalan administrative dan strategis. Kepemimpinan eksekutif memiliki otoritas yang

tinggi dalam semua fungsi organisasi di mana juga memiliki kemampuan untuk menjaga kemauan, entusias, dan mengkoordinasi usaha dari keseluruhan organisasi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian tipe yang lain adalah kepemimpinan operatif (*operative leadership).* Tipe kepemimpinan seperti ini berhubungan dengan usaha dalam mempengaruhi kelompok kecil untuk bekerjasama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengutip Beishline, terdapat tiga tipe kepemimpinan, yaitu; kepemimpinan positif, kepemimpinan netral, dan negatif. Kepemimpinan positif (*positive leadership)* merupakan kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama antar anggota kelompok dalam situasi kerja yang kondusif sebagai sebuah *team work* dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan positif memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam setiap situasi secara tepat dan mampu mengangkat moral para bawahannya untuk bekerjasama dengan baik. Kepemimpinan netral (*neutral leadership)* merupakan bentuk kepemimpinan yang pasif dan cenderung jarang member kepemimpinannya kepada bawahannya, akibatnya, para bawahan harus mengambil inisiatif sendiri dalam menyelesaikan tugasnya. Kepemimpinan negatif (*negative leadership)* merupakan tipe kepemimpinan yang sering mendominasi dan mengkritik bawahan secara kasar. Kelompok yang dipimpinnya cenderung tidak pernah berdiskusi atau mendapat petunjuk dari atasannya dan bahkan sering kali tidak ada alasan yang dapat menjelaskan suatu perintah kerja dari atasannya (Bakrie, 2007: 32-33).

Pada titik ini kita perlu memasukan faktor lain, yakni moral, yang merupakan faktor yang tidak kalah pentingnnya dalam organisasi dan manajemen militer. James Mooney, secara umum menyatakan pentingnnya moral dalam militer sebagai berikut:

> "Faktor-faktor yang mempengaruhi efesiensi dalam militer, dimana faktor-faktor tersebut dapat membangun moral prajurit adalah disiplin dan teknik. Hal ini perlu dipahami secara terkait, bahwa keduanya dalam realitas merupakan tahapan yang sama. Kita selalu berpikir bahwa yang dapat diberikan adalah "teknik militer" dan melatih prajurit untuk menjadi "sanagat disiplin". Dalam menjaga hal tersebut, pasti banyak terdapat berbagai teknik militer untuk melatih para prajurit, demikian juga menciptakan disiplin yang tinggi. Kaitan semua hal tersebut dapat diekspresikan dalam terminologi militer sebagai "kesatuan doktrin", dan tanpa hal itu, militer tidak akan efisien sebagai organisasi perang" (Bakrie. 2007: 34-35).

Tidak perlu ada perdebatan yang dalam untuk mengatakan bahwa perencanaan dalam semua aktivitas menempati posisi yang penting, dan ini tidak terkecuali juga dalam manajemen militer. Kita melihat sekurang-kurangnya ada tiga hal penting dalam perencanaan (*planning)* manajemen militer yakni, perumusan tujuan militer, perumusan kebijakan militer, dan terakhir, menyusun perencanaan militer. Jika demikian, definisi dari perencanaan militer menurut beishline adalah:

> "Proses penyeleksian guna mencari teknik pelaksanaan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi peramalan merupakan bagian terpenting dalam perencanaan" (Bakrie, 2007: 17-18).

2.9 Pandangan Realisme

Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith, jadi bisa memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut realism adalah *struggle for power* atau *realpolitik.* Kemudian realism berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistem internasional yakni anarki, kompetitif, kerap kali konflik, dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuasaan (*power politics)* (Perwita dan Yani, 2005: 25).

Dalam politik luar negeri suatu negara, paham realism ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateral (*unilateralism*), nationalis (*nationalism),* dengan strategi penangkalan (*deterrance*), perimbangan kekuatan (*balance of power*), dan aliansi-aliansi pertahanan (*defence alliance*) (Perwita dan Yani, 2005: 25).

Dalam realisme, elemen-elemen utama dalam hubungan internasional terdiri dari beberapa gagasan utama, yakni aktor dominan tetep berada pada negara-bangsa (*nation-state),* kepentingan nasional merupakan aspek utama yang haus diraih oleh setiap negara-bangsa untuk tetap bisa eksis/*survive* denga hirauan utama pada isu *high politics* seperti keamanan melalui instrumen *militery power.* Bahkan setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalkan posisi kekuatan (*power)* relatifnya dibandingkan negara lainnya atau setidaknya tercipta *balance of power.* Semakin besar keuntungan kekuatan militernya akan semakin besar pula jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut. (Hermawan, 2007: 26-27).

Realisme memahami hubungan internasional sebagai situasi yang anarkis sehingga membutuhkan distribusi kekuasaan antar negara. Bagi realisme negara adalah aktor utama dalam dunia internasional. Realisme sangat menghargai kedaulatan suatu negara dan konsep *self-determination (*penentuan nasib sendiri). Menurut realis bahwa dalam dunia yang anarkis negara harus mampu mempertahankan kedaulatannya dengan segala cara. Meskipun setiap negara memiliki persepsi ancaman sendiri, realis mempercayai bahwa ancaman utama bagi suatu negara berasal dari kekuatan militer negara lain. Oleh karena itu, negara diharuskan untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam segala aspek, terutama militer untuk menjaga keamanan nasional.